

Studi tentang Landasan Kependidikan

Made Pidarta

Abstract: The purpose of this study is to explore new concepts on foundations of education and possibilities to build an Indonesian Paedagogy. The main finding is that education must be based on our national culture. The government' initiative is needed to build an Indonesian Paedagogy. In this globalization era there will be transitions in educational paradigms from school education toward school and out-of-school education. The out-of-school education must be managed intensively as well as the school education. Education in this globalization era emphasizes the importance of science and technology. There must be a synchronization of Religion Education, Pancasila Education and Citizenship, and an emphasis on its implementation in daily life. To educate is to create a situation so that students learn by their own motivation.

Keywords: landasan kependidikan, ilmu pendidikan.

Semua informasi ilmiah, terutama yang berbahasa Indonesia, perlu ditingkatkan mutunya. Salah satunya yang mendesak adalah informasi tentang landasan kependidikan, karena informasi ini melandasi pengembangan teori dan praktik pendidikan dalam rangka mewujudkan ilmu pendidikan bercorak Indonesia setelah melalui penelitian di lapangan. Ilmu pendidikan seperti ini dibutuhkan mengingat bangsa Indonesia memiliki kebudayaan, jiwa, semangat, dan kebiasaan hidup tersendiri, hidup dalam wilayah geografis tersendiri, serta memiliki filsafat hidup Pancasila yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.

Penelitian kepustakaan ini berusaha mengungkapkan konsep-konsep baru, terutama bertalian dengan era globalisasi sekarang, dan dengan kemungkinan terbentuknya filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan yang bercorak Indonesia, serta dalam upaya mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional yang menginginkan perkembangan manusia Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila.

Made Pidarta adalah dosen Program Pasca Sarjana IKIP Surabaya

METODE

Seperti biasanya dalam penelitian kepustakaan, data diambil dengan cara membaca dan mencatat informasi-informasi yang relevan dengan kebutuhan. Bahan-bahan bacaan mencakup buku-buku teks, jurnal-jurnal atau majalah-majalah ilmiah, dan hasil-hasil penelitian. Bacaan-bacaan ini diambil dari beberapa perpustakaan, dengan jumlah sebanyak mungkin, diutamakan yang terbaru.

Data yang dijangkau ini kemudian dianalisis dengan cara sebagai berikut: (1) dikelompokkan menurut landasan pendidikan ditambah dengan pendidikan dan profesionalisasi pendidik sebagai bahan penyempurna; (2) masing-masing kelompok tersebut kemudian dipilah-pilah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil; (3) setiap akhir analisis kelompok dilengkapi dengan dampak konsep pendidikan yang mungkin dapat dimanfaatkan dalam menyusun ilmu pendidikan yang bercorak Indonesia.

Laporan penelitian yang dihasilkan adalah berbentuk buku teks Landasan Kependidikan. Memang tujuan penelitian kepustakaan ini adalah untuk menyusun buku teks yang akan digunakan sebagai bahan kuliah di perguruan tinggi.

HASIL

Kajian tentang konsep-konsep pendidikan menemukan tiga bentuk pendidikan yaitu (1) pendidikan yang dilakukan secara tradisional, yang sebagian besar berdasarkan intuisi dan kebiasaan secara turun-temurun, (2) pendidikan sebagai teori umum atau PBM yang banyak dianut di Amerika Serikat, dan (3) pendidikan sebagai Ilmu Pendidikan. Indonesia tidak dapat memakai pendidikan sebagai teori umum seperti halnya dengan Amerika Serikat yang tujuan pendidikannya tidak tetap, melainkan lebih cocok memakai pendidikan sebagai Ilmu Pendidikan karena memiliki tujuan pendidikan yang tetap. Tujuan yang tetap harus dicapai dengan alat yang tetap, yaitu pendidikan sebagai ilmu yang bercorak Indonesia.

Tujuan pendidikan di Indonesia adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang diwarnai oleh sila-sila Pancasila. Arah pengembangan seperti ini ada pada semua jenjang pendidikan dan GBHN 1993, yaitu semua aspek kejiwaan dan jasmani dikembangkan secara berimbang, harmonis, dan terintegrasi. Berimbang artinya semua potensi dilayani sesuai dengan besarnya potensi masing-masing. Harmonis berarti pelayanan terhadap potensi-potensi itu, afeksi, kognisi, dan psikomotor, tidak pilih kasih. Terintegrasi berarti bahwa pengem-

bangun potensi-potensi itu dikaitkan satu dengan yang lain secara wajar. Arah pengembangan seperti ini sesuai dengan pemikiran para ahli pendidikan modern.

Pendidikan sebagai ilmu telah memenuhi persyaratan, yaitu memiliki obyek, metode penyelidikan, sistematika, dan tujuan. Obyek materinya adalah manusia dan obyek formanya adalah gejala yang tampak, dirasakan, dihayati, dan diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Metode penyelidikannya adalah metodologi ilmiah, dan sistematika serta tujuannya juga telah ada karena deskripsi pendidikan dilakukan secara sistematis dan tujuannya telah tercantum antara lain dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Syarat ontologi, epistemologi, dan aksiologi (ISPI, 1989) juga telah terpenuhi. Ontologi atau masalah apa yang ditangani adalah obyek materi forma tersebut di atas. Epistemologi atau masalah kebenaran telah terjamin dengan diterapkannya metodologi ilmiah. Sedang aksiologi atau tindakan yang benar bertalian dengan tujuan pendidikan yang ingin direalisasi.

Pengertian mendidik bukanlah sekadar membuat peserta didik dan warga belajar sopan, taat, jujur, hormat, setia, dan sebagainya, bukan juga mengajarkan mereka ilmu, teknologi, dan seni, melainkan mendidik adalah membuat kesempatan dan menciptakan situasi yang kondusif agar mereka mau dan dapat belajar atas dorongan diri sendiri untuk mengembangkan bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya. Pendidik hanya memberi bimbingan apabila diperlukan. Dengan pengertian pendidikan seperti ini akan menjadi jelas bahwa pekerjaan mendidik hanya dapat dilakukan oleh para pendidik yang profesional.

Tujuan mendidik bukan hanya untuk mendapatkan prestasi akademik yang tinggi, melainkan yang lebih penting adalah pengembangan afeksi yang mendasari prestasi tersebut. Afeksi yang dimaksud adalah sikap suka belajar, tahu tentang cara belajar, percaya diri, mencintai prestasi tinggi, memiliki etos kerja, kreatif dan produktif, dan puas akan sukses yang dicapai.

Bertalian dengan era globalisasi, peranan pendidikan luar sekolah menjadi sama pentingnya dengan pendidikan jalur sekolah dalam membantu mengembangkan anak-anak. Bahkan ada yang menginginkan agar paradigma pendidikan sekolah digeser menjadi paradigma sekolah dan luar sekolah. Ini berarti bahwa perhatian dan intensitas penanganan pendidikan luar sekolah perlu ditingkatkan agar sejajar dengan pendidikan sekolah.

Mengenai landasan hukum, beberapa penjelasan dapat dikemukakan. Pertama-tama tentang perbedaan antara pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik menyiapkan para ahli agar mampu mengembangkan ilmu atau teknologi atau seni di bidangnya masing-masing melalui aktualisasi

diri secara utuh. Oleh karena itu jumlah peserta didiknya tidak perlu ditentukan sesuai dengan kebutuhan, sampai mereka dipandang mampu hidup mandiri. Sementara itu pendidikan profesi bertujuan menyiapkan peserta didik agar ahli dalam menerapkan teori tertentu. Jumlah mereka dibatasi sesuai dengan kebutuhan, dan wajib ditempatkan setelah mereka lulus.

Pendidikan harus berakar pada kebudayaan nasional. Untuk itu dibutuhkan kurikulum perguruan tinggi yang dapat mendorong kemauan atau sikap tertarik untuk mengembangkan ilmu yang bersumber dari tanah air sendiri. Ilmu Pendidikan yang berakar pada kebudayaan nasional, sebagai ilmu induk dalam mengembangkan manusia Indonesia, perlu mendapat perhatian secara khusus, terutama pada kurikulum S3.

Selanjutnya untuk merealisasikan terwujudnya pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, seperti yang dikemukakan sebagai tujuan pendidikan nasional, diperlukan perhatian yang sama terhadap pengembangan afeksi, kognisi, dan psikomotor pada semua tingkat pendidikan, antara lain dievaluasi dengan cara yang sama, dan nilainya dimasukkan ke dalam rapor.

Pendidikan humaniora, termasuk pendidikan moral Pancasila, dan/atau Penataran P-4, perlu menekankan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di kampus. Pembinaan mental spiritual ini akan lebih berhasil manakala guru atau dosen Pancasila, agama, dan kewarganegaraan membentuk diri menjadi suatu tim pendidik. Dengan cara ini rencana dan tindakan dalam membina mental spiritual peserta didik akan searah dan terfokus kepada pencapaian cita-cita pendidikan nasional kita, khususnya dalam bidang kerohanian.

Pembahasan tentang landasan filsafat menunjukkan bahwa suatu ilmu lahir dari suatu filsafat atau filsafat tentang ilmu itu. Ilmu Pendidikan, misalnya, dapat lahir dari filsafat negara dan dapat juga lahir dari filsafat pendidikan tersebut. Untuk mewujudkan filsafat pendidikan Indonesia agar Ilmu Pendidikan bercorak Indonesia lebih mudah dibentuk, dibutuhkan kemauan politik pemerintah, karena kunci keberhasilan hampir semua kegiatan sekarang ada pada pemerintah. Maksud filsafat pendidikan dalam membentuk Ilmu Pendidikan adalah menginspirasi model tertentu, melakukan penelitian, menganalisis data atau konsep-konsep yang diketemukan, dan mendeskripsikan (Arbi, 1988).

Selanjutnya Suriasumantri (1981) menyatakan bahwa dalam proses pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Pendidikan, terjadi dua tingkat, yaitu tingkat empiris dan tingkat teoretis. Tingkat empiris ialah ilmu yang baru diketemukan di lapangan, ilmu yang masih berdiri sendiri-sendiri. Tingkat teoretis adalah

manakala penemuan sudah cukup banyak, kaitannya satu sama lain diketemukan, sehingga menimbulkan struktur teoretis, yang membentuk suatu kesatuan ilmu. Pengembangan Ilmu Pendidikan di Indonesia memang sangat diperlukan terbukti dari hasil penelitian Jasin (1994) yang menyatakan bahwa lebih separoh responden menghendaki penegasan kembali pengertian pendidikan dan pengajaran, hampir separoh responden menyatakan Ilmu Pendidikan kurang dikembangkan, sebagian dari mereka menyatakan Ilmu Pendidikan sebagai ilmu mandiri dan sebagian lagi sebagai ilmu terapan, dan semua responden menyatakan kurang mengenal struktur Ilmu Pendidikan.

Dalam mengembangkan Ilmu Pendidikan, apakah kita akan berpihak pada paham empirisme, nativisme, atau konvergensi, perlu disimak hasil penelitian berikut. Jensen menemukan bahwa rata-rata skor tes mental anak-anak kulit putih berbeda 15 macam dengan skor tes mental anak-anak kulit hitam. Dari perbedaan itu hanya tiga atau empat saja yang bertalian dengan perbedaan lingkungan atau pendidikan/kebudayaan. Selebihnya dijelaskan oleh perbedaan konstitusi genetik (dalam Arbi, 1988). Hasil penelitian Jencks dan kawan-kawan mendukung hasil penelitian di atas, yang mengatakan bahwa hubungan antara kesempatan mendapat pendidikan dengan sukses dalam masyarakat Amerika Serikat tidak tinggi atau tidak pasti (dalam Arbi, 1988).

Dari landasan sejarah, tugas pendidikan sebagian adalah untuk membentuk mental dan moral serta sebagian lagi untuk memberi pengetahuan dan keterampilan. Pembentukan kedua hal terakhir relatif lebih mudah daripada membentuk kedua hal pertama. Ini pula sebabnya mengapa membangun bidang material seperti jalan, jembatan, gedung, pertanian, dan penyembuhan penyakit lebih mudah daripada membentuk mental Pancasila dan agamis serta moralis pada anak-anak dan kaum remaja.

Pendidikan agama, penanaman nilai-nilai kebudayaan, termasuk semangat 45, perlu diintensifkan. Hal ini tidak cukup diberikan dalam bidang satu studi saja, melainkan harus diperluas ke bidang studi lain secara integratif. Dengan demikian harapan Emil Salim (1990) bahwa ciri utama pendidikan Indonesia adalah keseimbangan antara aspek material dan spiritual akan tercapai.

Di samping hal tersebut di atas, Buchori (1990) menyatakan bahwa budaya modern pada masa sekarang bersumber dari kemajuan ilmu dan teknologi. Ini berarti bahwa pada era globalisasi, pendidikan harus berintikan ilmu dan teknologi, dengan catatan tidak mengesampingkan pengembangan mental dan spiritual.

Untuk memajukan pendidikan, Indonesia telah banyak melakukan inovasi. Namun inovasi-inovasi itu gagal antara lain karena merupakan imitasi dari

praktik-praktik dan pemikiran dunia barat, di samping karena heterogenitas budaya dan luasnya wilayah Indonesia (Tilaar, 1996). Untuk mengatasi hal ini Tilaar mengharapkan inovasi bersumber dari hasil-hasil penelitian di Indonesia.

Kebudayaan nasional harus dimajukan. Hal ini didukung pula oleh pendapat Emil Salim (1990) yang menyatakan bahwa kebudayaan nasional merupakan pucuk-pucuk budaya daerah yang harus menjadi identitas bangsa Indonesia agar tidak ditelan oleh budaya global, atau, menggunakan istilah Makagiansar, agar mengakar pada budaya sendiri (Makagiansar, 1990).

Membahas landasan sosial budaya, keberadaan lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitarnya; keduanya saling menunjang. Sekolah dan perguruan tinggi seharusnya menjadi agen pembangunan di masyarakat. Untuk itu perlu dibentuk badan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan wakil orang tua peserta didik, yang sekaligus ikut memajukan pendidikan.

Coleman (1984) menulis bahwa satu yang terpenting dari fungsi sekolah ialah memberikan dan membangkitkan kebutuhan sosial dan rekreasi pada anak-anak. Arbi (1988) menyebutkan sekolah sebagai alat kontrol sosial, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kemasyarakatan kepada anak-anak. Untuk itu sekolah perlu dibentuk sebagai masyarakat kecil, tatanan kecil atau *micro order* (Broom, 1981). Materi-materi pelajaran pun perlu diambilkan dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan masyarakat dan kejadian-kejadian di masyarakat dapat diangkat sebagai bahan pelajaran. Problema-problema masyarakat dibawa ke sekolah dan perguruan tinggi untuk dibahas bersama dan dicarikan pemecahannya.

Akibat kebudayaan masa kini, ada kemungkinan pergeseran paradigma pendidikan, seperti sudah disinggung di atas, yaitu: dari pendidikan sebagai usaha sadar ke pendidikan sebagai usaha sadar dan yang tidak disadari; dari pendidikan sekolah ke pendidikan sekolah dan luar sekolah; dari pendidikan pengajaran ke pendidikan pengajaran kebudayaan; dari proses *assembling* ke proses membangun sejak awal; dari anak yang patuh/taat ke anak yang mandiri; dan dari anak sebagai yang terlindungi ke anak yang berkompentensi (Anita, 1996).

Sebagai konsekuensi dari kemungkinan terjadinya pergeseran paradigma pendidikan, maka kebudayaan perlu ditertibkan dengan berbagai cara. Tayangan televisi, terutama televisi swasta, harus ditertibkan dalam penayangan kesenian dan film laga yang berbau kekerasan dan erotisme. Pemerintah harus membe-rantas "kebudayaan" narkoba dan minuman keras, mengurangi dan mengawasi tindakan klub malam, dan menangkap pelaku perkelahian. Kebudayaan nasional

yang perlu atau yang akan dikembangkan menurut Umar Kayam (1992) mengandung unsur-unsur: afeksi yang jujur, tidak munafik, dan ikhlas; politik yang demokratis; ekonomi yang memberi hidup dan kehidupan yang layak bagi semua lapisan masyarakat; pendidikan yang demokratis, memberi bekal untuk bekerja, dan memajukan ilmu serta teknologi setinggi-tingginya; kesenian yang kaya tanpa beban penghalang; memberi kesempatan yang luas untuk beragama, toleransi, dan damai satu sama lain.

Pembahasan tentang landasan psikologi memberikan informasi pendidikan antara lain, lima macam psikologi perkembangan yaitu psikologi perkembangan umum, psikologi perkembangan kemampuan belajar, psikologi perkembangan afeksi, psikologi perkembangan moral kognisi, dan psikologi perkembangan konasi. Kelima macam psikologi perkembangan ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik terutama untuk mengatur bahan pelajaran agar sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangan peserta didik.

Sama halnya dengan psikologi perkembangan, psikologi belajar dapat juga dikelompokkan. Dalam garis besarnya ada tiga kelompok teori belajarnya. Teori belajar klasik yang disebut Teori Disiplin Mental bermanfaat untuk menghafal perkalian dibawah 100 dan juga untuk melatih soal-soal. Teori belajar Behavioris dengan kondisioning instrumental dan kondisioning operannya serta penguatan dan asosiasinya bermanfaat untuk membentuk perilaku nyata, seperti kesediaan menyumbang, giat belajar, dan gemar menyanyi. Teori belajar kognisi cocok untuk mempelajari materi-materi pelajaran yang lebih rumit yang membutuhkan pemahaman, untuk memecahkan masalah, dan untuk berkreasi menciptakan sesuatu bentuk atau ide baru. Psikologi belajar ini dimanfaatkan oleh pendidik terutama dalam memperbaiki proses belajar mengajarnya.

Landasan ekonomi memberikan konsep-konsep ekonomi pendidikan. meskipun ekonomi memegang peranan yang cukup menentukan kehidupan dan kemajuan pendidikan, faktor yang paling menentukan kehidupan dan kemajuan pendidikan adalah dedikasi, keahlian, dan keterampilan pengelola dan guru-guru atau dosen-dosen lembaga pendidikan itu.

Fungsi ekonomi pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pelajaran untuk membentuk manusia ekonomi. Bahan pelajaran ini tidak perlu berdiri sendiri sebagai bidang studi. Manusia ekonomi yang dimaksud di atas adalah manusia yang memiliki etos kerja, dapat bekerja dengan sempurna dan tidak senang bekerja setengah-setengah, bersifat produktif, biasa hidup hemat dan biasa hidup efisien. Ciri manusia ekonomi ini sebagian diambil dari Buchori (1996) tentang arah sekolah unggulan luar negeri.

Untuk membentuk sumber daya manusia yang produktif, Mutrofin (1996) bercerita tentang cara-cara yang dilakukan di negara maju. Di sana sistem pendidikan, struktur, kurikulum, dan jumlah serta jenis pendidikan diatur kembali dan diorientasikan kepada kebutuhan pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada teknologi tinggi, fleksibilitas, dan mobilitas angkatan kerja. Tiap lembaga pendidikan seharusnya berupaya agar mampu menghidupi diri sendiri dengan cara mencari sumber-sumber dana tambahan sebanyak mungkin. Upaya ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan perkumpulan orang tua siswa/mahasiswa dan para tokoh masyarakat. Tidak pada tempatnya lembaga-lembaga pendidikan hanya menggantungkan diri kepada dana dari pemerintah atau yayasan.

Hasil pembahasan tentang profesionalisasi pendidik memberikan ciri-ciri profesi pendidikan yang lebih lengkap dari konsep-konsep yang sudah ada, antara lain pilihan didasarkan atas motivasi yang kuat untuk menjadi pendidik dan sebagai pakar yang diakui oleh masyarakat. Pengakuan ini menyiratkan tidak ada orang lain yang dapat melaksanakan tugas mendidik, kecuali para pendidik profesional.

Sama halnya dengan ciri-ciri profesi pendidikan, kode etik pendidikan pun dirumuskan secara lebih lengkap, antara lain mengandung unsur menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik, berbakti kepada peserta didik, menjadi teladan dalam berperilaku, dan mengembangkan profesi secara berkelanjutan.

Ada sejumlah kewajiban organisasi profesi pendidikan dalam rangka mengembangkan profesi pendidik. Kewajiban itu antara lain adalah mencari peluang untuk memajukan profesi para anggota, seperti izin belajar dan tugas belajar, mengadakan pembinaan profesi mengawasi pelaksanaan pendidikan, melaksanakan sanksi bagi yang melanggar kode etik pendidik, dan membentuk konsep-konsep pendidikan melalui hasil-hasil penelitian.

Penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan tidak cukup memiliki profesi pendidik saja. Mereka harus profesional dalam manajemen pendidikan, karena manajemen pendidikan memiliki ciri khusus yang tidak sama dengan manajemen dunia usaha atau manajemen pemerintahan. Manajemen pendidikan berbeda dengan manajemen dunia usaha yang mengejar keuntungan uang, tetapi dapat meniru manajemen itu dalam gerak dan dinamika untuk mempertahankan kehidupan dan kemajuan pendidikan. Manajemen pendidikan juga berbeda dengan manajemen pemerintahan, karena manajemen terakhir ini menangani manusia dewasa yang relatif telah memahami budaya yang patut ditaati. Sementara itu manajemen pendidikan menangani peserta didik yang sedang berkembang sebagai individu yang serba unik. Agar pekerjaan ini berhasil dibutuhkan banyak strategi,

pendekatan, dan metode yang sesuai. Dibutuhkan pula sejumlah konsep pendidikan yang inovatif agar perkembangan setiap peserta didik terealisasi secara relatif lancar dan optimal.

PEMBAHASAN

Profesi pendidik baik guru maupun dosen secara formal telah diakui dengan disebutnya sebagai pejabat profesional yang tunjangan profesinya dibayar. Namun dalam praktik ternyata banyak pekerjaan mendidik dilakukan oleh petugas-petugas yang tidak profesional dalam pendidikan, misalnya dosen dan instruktur kursus yang tidak berijazah guru. Akibat dari praktik-praktik seperti ini, masyarakat umum meragukan profesi guru atau dosen. Keraguan ini memang masuk akal, karena bukan hanya pendidik yang dapat mengerjakan pekerjaan mendidik, melainkan juga orang yang bukan pendidik.

Untuk mengatasi hal di atas dan sekaligus menantang para pendidik agar bekerja lebih keras sesuai dengan predikat yang disandanginya, yaitu petugas profesional, maka pengertian dan pelaksana mendidik perlu direvisi. Pengertian mendidik yang diajarkan adalah membuat kesempatan dan menciptakan situasi yang kondusif agar peserta didik mau dan dapat belajar atas dorongan sendiri untuk mengembangkan bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya. Membuat kesempatan dan menciptakan situasi agar peserta didik belajar atas dorongan sendiri inilah inti tugas pendidik. Tugas seperti ini cukup sulit dilakukan oleh orang yang tidak profesional dalam pendidikan. Sudah tentu bimbingan tetap diperlukan manakala peserta didik mendapatkan kesulitan. Dengan demikian tujuan mendidik pertama-tama adalah mengembangkan afeksi yang positif; dari sini diharapkan agar terjadi pengembangan kognisi dan psikomotor, yang pada gilirannya kelak tercapai tujuan perkembangan manusia seutuhnya.

Berkenaan dengan ketimpangan pelaksanaan pendidikan sekarang, yaitu pengembangan afeksi, khususnya agama, moral Pancasila dan kewarganegaraan yang tidak dilaksanakan seintensif pengembangan kognisi dan psikomotor yang dapat mengakibatkan kenakalan remaja, maka studi ini memang patut mengemukakan konsep inovasi dalam bidang ini. Konsep yang dimaksud adalah membuat pendidik yang menangani jenis pendidikan ini sebagai tim agar gerakannya searah dan kompak. Tekanan pendidikan adalah pada pelaksanaan sehari-hari yang juga diintegrasikan pada bidang-bidang studi lain, sedang skornya dicantumkan dalam transkrip atau rapor.

Fungsi ekonomi yang pertama, yaitu menunjang pelaksanaan pendidikan selama ini telah dilakukan, tetapi fungsi ekonomi yang kedua yaitu membantu

mengembangkan peserta didik menjadi manusia ekonomi belum diperhatikan. Padahal pembentukan manusia ekonomi pada masa pertambahan penduduk yang pesat ini sangat penting artinya untuk menghemat bahan-bahan konsumsi dan biaya kehidupan. Karenanya, masalah ini memang perlu digalakkan dalam dunia pendidikan. Sama halnya dengan pengembangan manusia ekonomi, pengembangan sumber daya manusia produktif pun patut digalakkan agar manusia tidak hanya dapat mengkonsumsi, melainkan juga dapat memproduksi.

Dalam kaitannya dengan ekonomi pendidikan perlu dibahas mengenai dana pendidikan. Sekolah-sekolah kita pada umumnya menggantungkan diri pada dana dari pemerintah atau yayasan, sehingga banyak sekolah yang mengalami kekurangan dana, terutama sekolah negeri. Mereka dapat belajar dari negara lain tentang cara mencukupi biaya pendidikan sendiri, antara lain dengan mencari dana melalui sumbangan orang tua, keuntungan kantin, toko pakaian seragam, penjualan barang-barang jadi buatan siswa, mengadakan bazar, mengadakan malam kesenian, menyewakan aula, bunga tabungan di bank, dan komisi mencari nasabah bank (Pidarta, 1995).

Studi ini juga menuliskan strategi pendidikan dalam menghadapi dampak globalisasi. Ada tiga hal penting yang disarankan dalam menghadapi era globalisasi, yaitu perlunya diadakan pergeseran paradigma pendidikan, penekanan pada ilmu dan teknologi, dan perlunya memperkuat budaya sendiri. Pergeseran paradigma pendidikan memang perlu dipikirkan, mengingat pengaruh luar sekolah terhadap perkembangan anak-anak sangat besar. Pengaruh yang dimaksud antara lain adalah tayangan televisi, pergaulan bebas, minuman keras, narkoba, dan budaya-budaya asing lainnya. Namun bila hal-hal negatif di luar pendidikan jalur sekolah tidak diperbaiki, pergeseran paradigma pendidikan tidak ada artinya. Penekanan ilmu dan teknologi dalam pendidikan memang keharusan karena globalisasi dipacu oleh ilmu dan teknologi. Namun Indonesia tidak boleh tenggelam dalam arus globalisasi, melainkan tetap mempertahankan identitas diri dengan budaya tersendiri. Umar Kayam telah mencanangkan bagaimana seharusnya budaya Indonesia yang baru itu, yang mencakup segala aspek kehidupan yang positif.

Semua isi pendidikan yang telah dibahas di atas perlu dikendalikan agar dapat berjalan relatif lancar. Pengendali secara makro adalah organisasi profesi pendidikan dan secara mikro adalah manajer pendidikan. Organisasi profesi pendidikan perlu lebih meningkatkan peranannya dalam mengendalikan para pendidik, agar mereka semakin profesional melaksanakan tugas dan semakin taat kepada kode etik pendidik. Sementara itu profesi manajer pendidikan yang

mengendalikan lembaga pendidikan juga perlu ditingkatkan mengingat manajer merupakan ujung tombak proses pendidikan berdasarkan hasil-hasil survai kemampuan dasar manajerial (Gaffar, 1995) dan mengingat tuntutan akan manajemen berkualitas dan pendidikan yang berkualitas merupakan dua aspek yang saling berkaitan (Kamars, 1995).

Agar semua harapan di atas dapat dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan, perlu dipikirkan terwujudnya filsafat pendidikan dan teori pendidikan yang cocok dengan kondisi Indonesia. Yang sudah ada adalah filsafat negara yaitu Pancasila dan yang baru ditangani adalah praktik pendidikan di jalur pendidikan sekolah (Soedomo, 1990). Praktik pendidikan sekarang bersifat mana suka, artinya yang dipraktikkan sesuai dengan pandangan dan selera pejabat yang berwenang serta para petugas pendidikan. Ini terjadi karena praktik pendidikan terlepas dari teori pendidikan dan filsafat pendidikan yang berperan sebagai pengendali. Karena peranan filsafat pendidikan dan teori pendidikan atau ilmu pendidikan yang bercorak Indonesia sangat penting untuk meluruskan arah pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang dicita-citakan, maka perlu segera ada upaya penyiapannya melalui penelitian-penelitian. Hal ini diyakini akan berhasil manakala ada kemauan politik pemerintah untuk merealisasikannya, karena dewasa ini hanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan sesuatu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ada sejumlah konsep baru dalam pendidikan perlu dikembangkan. Konsep itu antara lain adalah bahwa: pengertian mendidik harus ditekankan kepada penciptaan situasi agar peserta didik atas kemauan sendiri terdorong untuk belajar, sedang tujuan mendidik diorientasikan kepada pembentukan afeksi yang positif yang dapat mendorong pengembangan kognisi dan psikomotor. Pengembangan afeksi bidang agama, Pancasila, dan kewarganegaraan sebaiknya dilakukan secara tim dan menekankan praktik sehari-hari. Lembaga pendidikan, di samping mengembangkan sumber daya manusia produktif, perlu juga membentuk manusia ekonomi dan berusaha mencukupi biaya pendidikan sendiri dengan cara mencari sumber dana sebanyak-banyaknya. Dalam era globalisasi, pendidikan berintikan ilmu dan teknologi dengan tetap memperkuat budaya sendiri, dan ada kemungkinan pergeseran paradigma pendidikan dari sekolah ke kebudayaan yang menyeluruh.

Untuk menangani konsep-konsep baru ini diperlukan peningkatan profesi manajemen pendidikan dan menggiatkan fungsi organisasi profesi pendidikan. Agar semuanya dapat berlangsung sesuai dengan filsafat negara dan mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan nasional, perlu dirumuskan filsafat pendidikan Indonesia dan ilmu pendidikan yang bercorak Indonesia. Yang terakhir ini sangat mungkin terealisasi apabila ada kemauan politik dari pemerintah untuk mewujudkannya.

Saran

Disarankan kepada semua ahli pendidikan dan pemerintah yang berwenang menangani bidang ini untuk mengkaji hasil studi ini, yang mungkin secara bertahap dapat direalisasikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anita L. 1996. Tantangan Pendidikan dalam Era Pascamodern. *Sinergi*, no. 2.
- Arbi, S.Z. 1988. *Pengantar kepada Filsafat Pendidikan*. Jakarta: P2LPTK, Depdikbud.
- Broom, L. 1981. *Sociology*. New York: Harper and Row, Publishers.
- Buchori. M. 1990. Menyongsong Globalisasi. *Mimbar Pendidikan*, no. 4, tahun IX.
- Buchori, M. 1996. Menuju Madrasah Unggul. *Transformasi Pendidikan di Indonesia dan Tantangannya di Masa Depan*. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press.
- Coleman, J.W., dan Crassey. D.R. 1984. *Social Problems*. New York: Harper and Row, Publishers.
- Gaffar, M.F. 1995. *Status Pengelola Satuan Pendidikan: Antara Kenyataan dan Harapan*. Makalah pada Temu Ilmiah Nasional Manajemen Pendidikan di Padang.
- ISPI. 1989. Perkembangan Ilmu Pendidikan di Indonesia dalam Kurun waktu 1965-1985. *Jurnal Pendidikan*, nomor 2.
- Jasin, S.A. 1994. Survei Sampel Keperluan dan Kebutuhan Ilmu Pendidikan. *Proceeding Seminar Hasil Penelitian Perguruan Tinggi, Buku 1: Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Dirbinlatabmas, Ditjen Dikti Depdikbud.
- Kamars, D. 1995. *Penyiapan Tenaga Manajemen Pendidikan Tingkat Pascasarjana*. Makalah Temu Ilmiah Nasional Manajemen Pendidikan di Padang.

- Kayam, U. 1992. Kebudayaan Nasional, Kebudayaan Baru. *Kebudayaan*, no. 2, Tahun I.
- Makagiansar, M. 1990. Dimensi dan Tantangan Pendidikan dalam Era Globalisasi. *Mimbar Pendidikan*, no. 4, Tahun IX.
- Mutrofin. 1996. Pendidikan, Ekonomi, dan SDM Produktif. *Transformasi Pendidikan di Indonesia dan Tantangannya di Masa Depan*. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press.
- Pidarta, M. 1995. *SD dan Teknik-teknik Mengajar pada Beberapa Sekolah di Australia*. Hasil penelitian. Surabaya: Laboratorium Administrasi Pendidikan, FIP IKIP Surabaya.
- Salim, E. 1990. Pembekalan Kemampuan Intelektual untuk Menjinakkan Gelombang Globalisasi. *Mimbar Pendidikan*, no. 4. Tahun IX.
- Soedomo, M. 1990. *Aktualisasi Pengembangan Ilmu Pendidikan dalam Pembangunan Nasional*. Pidato Pengukuhan Guru Besar IKIP MALANG, Malang.
- Suriasumantri, J.S. 1981. *Ilmu dalam Perspektif*. Jakarta: Gramedia.
- Tilaar, H.A.R. 1996. *Inovasi Pendidikan dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Makalah pada Simposium Nasional, Yogyakarta.